

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM SEKTOR UMKM DI MASYARAKAT

Taufik Caniago, Lusiana Rahmatiani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
HK19.taufikcaniago@mhs.ubpkarawang.ac.id
lusiana.rahmatiani@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Salah Satu bentuk Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa adalah dengan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Melihat adanya beberapa usaha yang belum mendaftarkan usahanya kepada badan yang berwenang ataupun kepada aparat desa jatiwangi. Desa jatiwangi merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa barat. Selama ini Kondisi usaha mikro di masyarakat Jatiwangi sebagian besar diantaranya masih belum memiliki legalitas usaha, yaitu Nomor Izin Berusaha (NIB) bahkan diabaikan. Tujuan Pendampingan Pembuatan Nomor Izin Berusaha sebagai identitas berusaha sekaligus NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenalan Impor (API), Akses Kepabean. Metode yang dilakukan dalam Laporan Individu ini adalah dengan cara observasi atau wawancara dan mengambil d okumen data dari dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 5 juli 2022 sampai 19 juli 2022 bertempat di desa jatiwangi, Kecamatan Jatisari, dengan target sasaran yaitu berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat Melalui UMKM. persyaratan pendaftaran NIB yang diatur dalam PP No.5 Tahun 2021. Yang dimana pasal Tersebut Menjelaskan pendaftaran UMKM dilakukan Secara Daring atau luring dengan melampirkan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Berusaha dari RT. Selanjutnya, Pelaku UMKM Mendapatkan NIB melalui Perizinan Berusaha Secara Elektronik NIB tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Bahkan pendaftaran usaha tersebut tanpa melakukan suatu biaya, tentu in i sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha UMKM. Salah satu cara agar masyarakat dapat paham dan sadar ada hukum yang dapat membantu dan menjaga suatu usahanya yaitu dengan cara penyuluhan baik dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat RT dan RW agar terciptanya.

Kata kunci: Kuliah Kerja Nyata, NIB, UMK-M

Pendahuluan

Universitas Buana Perjuangan Karawang Kembali menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis Hybrid wajib melaksanakan Tri-Dharma yang dimaksud merupakan Pelaksanaan Pendidikan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana Tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Salah Satu bentuk Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa adalah dengan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN Universitas Buana Perjuangan Karawang di Desa jatiwangi merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa barat. Dengan program kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan tema KKN yaitu “ Inovasi dan Digitalisasi UMKM. Meliputi Program Kerja Individu Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Sektor UMKM Di Masyarakat.

Melihat adanya beberapa usaha yang belum mendaftarkan usahanya kepada badan yang berwenang ataupun kepada aparat desa jatiwangi. Desa jatiwangi merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa barat. Selama ini Kondisi usaha mikro di masyarakat Jatiwangi sebagian besar diantaranya masih belum memiliki legalitas usaha, yaitu Nomor Izin Berusaha (NIB) bahkan diabaikan. Pada umumnya Legalitasi dianggap belum penting dan selain itu proses yang panjang dalam pengurusan izin, surat menyurat sehingga menjadi alasan bagi rendahnya usaha mikro untuk pengurusan legalitas. Nomor Induk Berusaha dimana telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada banyak pelaku UMKM di desa Jatiwangi salah satunya yaitu Pupuk Organik Putra Jatiwangi Yang mana produknya belum mendapatkan legalitas sehingga sulit pelaku usaha mendapatkan akses pemodal dan tidak adanya perlindungan hukum.

Dalam Hal ini Penulis Melakukan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar pelaku usaha mendapatkan Perlindungan Hukum dan mendapatkan akses pemodal.

Metode

Metode yang dilakukan dalam Laporan Individu ini adalah dengan cara observasi atau wawancara dan mengambil dokumen data dari dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 juli 2022 sampai 19 juli 2022 bertempat di desa jatiwangi, Kecamatan Jatisari, dengan target sasaran yaitu berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat Melalui UMKM.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Melalui salah satu usaha milik masyarakat di desa jatiwangi Pupuk Organik Putra Jatiwangi yang juga belum melakukan legalitas usaha kepada pihak berwenang, izin dalam berusaha sangatlah penting terutama bagi para pelaku UMKM. Nomor Induk berusaha atau (NIB) suatu identitas pelaku usaha maupun badan usaha, manfaat bagi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut dilakukan adalah, agar pelaku UMKM mendapatkan Perlindungan Hukum, memperoleh akses pemodal. Mendaftarkan dapat dilakukan kepada badan yang berwenang ataupun dapat kepada aparat desa setempat. Namun sangat disayangkan jika para pegiat UMKM di Desa Jatiwangi tidak mendaftarkan usahanya. Sangat mudah untuk persyaratan pendaftaran NIB yang diatur dalam PP No.5 Tahun 2021. Yang dimana pasal Tersebut Menjelaskan pendaftaran UMKM dilakukan Secara Daring atau luring dengan melampirkan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Berusaha dari RT. Selanjutnya, Pelaku UMKM Mendapatkan NIB melalui Perizinan Berusaha Secara Elektronik NIB tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Bahkan pendaftaran usaha tersebut tanpa melakukan suatu biaya, tentu ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha UMKM. Pelaksanaan Pendampingan Pembuatan NIB ini dimulai pada tanggal 15 juli 2022 sampai tanggal 19 juli 2022



Kesimpulan

Peran Desa Jatiwangi dalam meningkatkan ekonomi dan mengembangkan UMKM harus berperan aktif di dalam masyarakat, agar masyarakat dapat sadar dan mengetahui bahwa adanya suatu perlindungan hukum untuk usahanya agar tetap terjaga. Salah satu cara agar masyarakat dapat paham dan sadar ada hukum yang dapat membantu dan menjaga suatu usahanya yaitu dengan cara penyuluhan baik dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat RT dan RW agar terciptanya. Suatu pergerakan dari pemerintah yang masif dan dapat membantu masyarakat secara merata.

Rekomendasi

Diharapkan kedepannya desa Jatiwangi dapat membantu para pelaku UMKM lainnya yang mempunyai usaha mampu memahami pentingnya pembuatan NIB dan Manfaat adanya NIB untuk urusan usahanya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PerPres no 91/2017

PP No 24/2018

PP no 5/2021

Peraturan BKPM no 3 dan no 4 tahun 2021